



**IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS DALAM
MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI DI INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG**

T E S I S

Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Disusun Oleh:

SRI BENY INDARWATI

NPM. 201003631010467

Program Studi : Magister Administrasi Publik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG**

2022



**IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS DALAM MENDUKUNG
REFORMASI BIROKRASI DI INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG**

SRI BENY INDARWATI

NPM. 201003631010467

Program Studi : Magister Administrasi Publik

T E S I S

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui Tim Penguji dan disahkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tanggal seperti tertera di bawah ini

Semarang, 1 April 2022

1. Dr. Tri Lestari Hadiati, M. Si
Ketua Tim Penguji/Pembimbing
2. Dr. Sumarmo, M. Si
Penguji I
3. Dr. Rini Werdiningsih, MS
Penguji II

Tri Lestari Hadiati
.....
Sumarmo
.....
Rini Werdiningsih
.....

Mengesahkan,
Dekan Fisip UNTAG Semarang

Rini Werdiningsih
.....
Dr. Rini Werdiningsih, MS
NIDN: 0611126101



**IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS DALAM
MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI DI INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG**

SRI BENY INDARWATI

NPM. 201003631010467

Program Studi : Magister Administrasi Publik

T E S I S

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui oleh Pembimbing dan Ketua Program Studi Pada tanggal seperti tertera di bawah ini:

Semarang, 1 April 2022

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. Tri Lestari Hadiati, M. Si
NIDN: 068056501

Pembimbing II,

Dr. Sumarmo, M. Si
NIDN: 0611126101

Menyetujui,

Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik

Dr. Tri Lestari Hadiati, M. Si
NIDN: 068056501

ABSTRAK

Semua karyawan belum berkomitmen dalam pembangunan integritas di Inspektorat, belum adanya inovasi teknologi informasi, masih kurangnya jumlah pejabat fungsional sesuai dengan kebutuhan organisasi, masih kurangnya SDM yang berkualitas, Penanganan pengaduan masyarakat masih lambat, dan belum dilaksanakannya survey kepuasan masyarakat merupakan masalah yang dihadapi inspektorat dalam kinerja organisasi mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi adalah melalui pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Bagaimana Implementasi Zona Integritas Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Di Inspektorat Kabupaten Temanggung, dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Implementasi Zona Integritas Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Di Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan hal yang akan diteliti. Tujuan penelitian adalah Menganalisis Implementasi Zona Integritas Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Di Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Menganalisa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Zona Integritas Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Di Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Dengan teknis analisa data Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan dan.

Penelitian menghasilkan simpulan bahwa Implementasi Zona Integritas Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Di Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat dikaji dari empat variabel antara lain (a) komunikasi, (b) Sumber daya, (c) Sikap atau perilaku dan (d) struktur birokrasi. Faktor pendukung dalam Implementasi Zona Integritas Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Di Inspektorat Kabupaten Temanggung (a) Komitmen Pimpinan, (b) Pengetahuan/Skil, (c) sikap, (d) penataan system manajemen SDM dan (e) Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Dan faktor penghambat (a) Komitmen anggota organisasi, (b) Mindset dan budaya kerja, (c) pengumpulan dokumen Zona Integritas, (4) Sumber daya manusia dan (5) sarana prasarana.

Kata kunci : implementasi Kebijakan, Reformasi Birokrasi, Zona integritas,

ABSTRACT

All employees are committed to building integrity at the Inspectorate, there is no information technology innovation, there is still a lack of functional officials in accordance with the needs of the organization, there is still a lack of qualified human resources, handling of public complaints is still slow, and the community satisfaction survey has not been carried out. Organizational performance in accelerating the realization of bureaucratic reform is through the development of an Integrity Zone towards WBK/WBBM.

How the Integrity Zone Implementation in Supporting Bureaucratic Reform in the Temanggung Regency Inspectorate, and the supporting and inhibiting factors that affect the Implementation of the Integrity Zone in Supporting Bureaucratic Reform in the Temanggung Regency Inspectorate are things that will be investigated. The purpose of the study was to analyze the implementation of the Integrity Zone in Supporting Bureaucratic Reform at the Temanggung Regency Inspectorate and to analyze the supporting and inhibiting factors for the Implementation of the Integrity Zone in Supporting Bureaucratic Reform at the Temanggung Regency Inspectorate.

The type of research used is descriptive qualitative with data collection techniques used are observation, interviews, documentation. With technical data analysis, data reduction, data presentation, conclusion drawing and.

The research concludes that the implementation of the Integrity Zone in Supporting Bureaucratic Reform at the Temanggung Regency Inspectorate can be studied from four variables, including (a) communication, (b) resources, (c) attitude or behavior and (d) bureaucratic structure. Supporting factors in the Implementation of the Integrity Zone in Supporting Bureaucratic Reform at the Temanggung Regency Inspectorate (a) Leadership Commitment, (b) Knowledge/Skill, (c) attitude, (d) HR management system arrangement and (e) Performance Accountability Strengthening. And inhibiting factors (a) Commitment of organizational members, (b) Mindset and work culture, (c) Integrity Zone document collection, (4) Human resources and (5) infrastructure.

Keywords: Policy implementation, Bureaucratic Reform, Integrity Zone